

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Bachtar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Huda, Ni'matul *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Isra, Saldi. *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Junaidi, Muhammad. *Hukum Konstitusi Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Manan, Bagir. *Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan Dan Negara Hukum, Dalam Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Mustakim, *Pengantar Hukum Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Nuswardani, Nunuk. *Sistem Pemerintahan Indonesia Konsep dan Praksis Penyelenggaraannya*. Malang: Setara Press, 2021.

Sapto Nugroho, Sigit. *Metodologi Riset Hukum*. Palur Wetan: Oasa Pustaka 2020.

Sibuea, Hotma, P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Siddiq Armia, Muhammad. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: LKKI 2022.

Solikin, Nur. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pasuruan: IKAPI 2021.

Sinaga, Parbuntian. *Eksistensi Menteri Negara Dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945*. Tangerang: PT. Pustaka Mandiri, 2022.

Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi & Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Semarang: Grafindo Cetakan Pertama, 2016.

Zainal Asikin, Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

B. JURNAL

Arianti, Riska. "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara" *Jurnal Hukum dan Keadilan* 6: 2 (September 2019), 129

Benuf, Muhamad Azhar, Kornelius. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" *Gema Keadilan* 7: 1 (Juni 2020): 23-24.

Dharmasisya, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Di Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2: 2 (Juni 2022), 1029.

Djaafara, Aryuni, Fitri. dkk. "Peran dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia" *Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2: 8 (Desember 2022): 1423.

Ekawati, Dian. "Model of the Indonesian Legal System" *Jurnal Kewarganegaraan*, 2035-2040.

Fitrianita, Ika dkk. “Dualisme (Rangkap) Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/Puu-Xvii/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara” *journal of law review* 1: 1 (Februari 2022): 11.

Istiqamah, Hikmah. “Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law “*Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3: 1 (September 2024), 1-6.

Kausar, Reza. “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Kenegaraan* 5: 2 (Mei 2021), 143-144.

Khuluqi, Mohamad, Ahsanul. “Sejarah Sistem Pemerintahan dan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia” *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 26: 2 (Desember 2023), 169-180.

L, Debora, Sanur. “Implikasi Perubahan Undang-Undang Kementerian Negara Terhadap Struktur Pemerintahan” *Jurnal Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan* 16: 18 (September 2024), 06-09.

Liu, Christin, Nathania. “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia” *Jurnal Lex Privatum* 10: 5 (2022), 04-11.

Maharani Sukma, Retno Saraswati, Novira. “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79PUU-IX-2011”. *Law Reform* 8. 2 (2013) 03.

Marlina, Rika. “Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia” *Jurnal Daulat Hukum* 1: 1 (Maret 2018), 175-177.

Maysarah, Andi. “Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia” *Jurnal Warta* 52 (April 2017), 5-6.

- Muabezi, Zaherman, Armandz. “Negara Berdasarkan Hukum, (*Rechtsstaat*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6: 3 (November 2017): 421.
- Muhammad, La, Ode. “Tinjauan Yuridis Transformasi Konstitusi Indonesia” *Jurnal Al-‘Adl* 12: 1 (Januari 2019), 95-96.
- Muhlashin, Ias. “Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8: 1 (Juni 2021): 90.
- Noviantika, M. Shofwan Taufiq, Tria. “Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara” *Homepage* 5: 1 (Januari 2021): 1.
- Nur, Zulfahmi. “Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia,” *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6: 1 (2023): 133-134.
- Pakpahan, Feliciano. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri” *Law Journal* 6: 1 (2017), 7.
- Ramadian, Pebi. “Analisis Yuridis Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri” *Jurnal of Constitutional Law* 2: 3 (2022), 434-435
- Razak, Furqan dkk. “Menteri Triumvirat Dalam Tata Kementerian Negara Republik Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum* 5: 1 (Maret 2024): 62.
- Ridlwan, Zulkarnain. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*” *Jurnal Ilmu Hukum* 5: 2 (Mei-Agustus 2012), 150.
- Rivaldo, Refo. “Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia” *Jurnal Lex Administratum* 12: 5 (Agustus 2023), 8.
- S. W Madjid, Agritama, Magrio. “Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara” *Constitution Jurnal* 1: 2 (November 2022): 170

- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, 14: 3 (September 2014), 547.
- Soyan, Roziqin, Ibnu. "Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *de Jure* 15: 1 (April 2023): 34-39.
- Subechi, Imam. "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia" *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1: 3 (November 2012), 345-352.
- Sunarto, "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" *Jurnal Masalah Hukum* 45: 2 (April 2016), 159-162.
- Wantu, Fence, M. "Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian Negara: Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif" *Jurnal Al-Ahkam* 15: 2 (June 2019): 69.
- Wibowo, Ahmad, Ilham. "Urgensi Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Reformasi" *Jurnal Hukum* 2: 28 (Mei 2021), 288-301.
- Yulistyowati, Efi. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen" *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18: 2 (Desember 2016), 330.

C. Majalah dan Buletin

- Hamid, Abdul. "Teori Perundang-undangan Indonesia," *Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI*, (April 1992): 8.
- Safaat, Ali. Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi, *Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi* (April 2016): 11-12.

D. Skripsi/Tesis

Buyung. Perbandingan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 Dengan Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Calon Perorangan. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2017.

Faisal, Anris. Pembentukan Kabinet Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945. *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

Jazillah, Eka. "Mekanisme Eksekusi Putusan Hak Uji Materil Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang" *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Nasional, 2022.

Mahleza, Deo, Ricky. Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2021.

Jitmau, Sefnat. "Tinjauan Terhadap Fungsi Pelayanan Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009," *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya, 2009.

Permana, Dadang. "Tugas Dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Mencegah Terjadinya Bahaya Laten Di Wilayah Teritorial KODIM 0618/BS KODAM III Siliwangi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia" *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2018.

Sya'ban, Nisfu. "Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD 1945) *Skripsi*, Fakultas Hukum dan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen 1, 2, 3 & 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009.

Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang organ/lembaga negara MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011.

F. Situs Web

Faiz, Nasrul. “Program 100 Hari Prabowo dan Kabinet Merah Putih” <https://www.liputan6.com/amp/> (Diakses Pada Tanggal 06 November 2024)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi. “Proses Kelahiran UU Tentang Kementerian Negara” <https://www.menpan.go.id/site/> (Diakses Pada Tanggal 05 November 2024)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi. “Pemerintah dan DPR sepakati Revisi UU Kementerian Negara, Menteri PANRB: Kolaborasi penguatan tata kelola dan efektivitas pemerintahan”. <https://www.menpan.go.id/site/> (Diakses Pada Tanggal 06 November 2024)

Oktavira, Bernadetha, Aurelia. “Syarat Menjadi Menteri yang Wajib Dipenuhi” <https://www.hukumonline.com/> (Diakses Pada Tanggal 01 Maret 2025)

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Kabinet Pemerintah Indonesia” <https://setkab.go.id/profil-kabinet/> (Diakses Pada Tanggal 05 November 2024)

Wahyuni, Willa. “Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia” <https://www.hukumonline.com/> (Diakses Pada Tanggal 06 November 2024).